

BUKU AJAR

**Kebijakan Pengembangan dan Desain
Industri Olahan Kelapa Sawit
di Kabupaten Aceh Utara.**

This page is intentionally left blank

BUKU AJAR

**Kebijakan Pengembangan dan
Desain Industri Olahan Kelapa Sawit
di Kabupaten Aceh Utara.**

Disusun Oleh :

Dr. Asnawi, S.E.,M.Si
Dr. Rasyidin, S.Sos, M.A
Aiyub, S.E.,M.Ec
Amru Usman, S.E., M.Sc.

Asnawi, Rasyidin, Ayub, Amru Usman, 2015

BUKU AJAR: *Kebijakan Pengembangan dan Desain Industri Olahan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara.*

Editor:

Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh

ISBN 978-602-1373-25-5



Hak Cipta © 2015, pada *Asnawi, Rasyidin, Aiyub, Amru Usman*, All rights reserved.

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

BUKU AJAR:
***Kebijakan Pengembangan dan
Desain Industri Olahan Kelapa Sawit di
Kabupaten Aceh Utara.***

Hak Penerbitan pada Unimal Press

Layout: Eriyanto Darwin

Cetakan Pertama, September 2015

Dicetak oleh: Unimal Press

Alamat Penerbit:

Universitas Malikussaleh

Jl. Panglath No. 10, Keude Aceh, Lhokseumawe 24351

Nanggroe Aceh Darussalam

INDONESIA

+62-0645-47512

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis telah dapat dapat menyelesaikan buku ajar ini dengan judul ***Kebijakan Pengembangan dan Desain Industri Olahan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara***. Buku ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan di kabupaten Aceh Utara. Untuk kepentingan penerbitan, maka kami adakan perubahan di beberapa hal yang tidak dimuat dalam buku ini. Buku ajar ini kami harapkan menjadi bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa dan para peneliti yang mengkaji kebijakan, desain produksi, ekonomi pertanian dan lain seumpamanya baik dari kalangan produksi, maupun di Provinsi Aceh, Nasional bahkan di tingkat internasional.

Sektor pertanian khususnya sub sektor kelapa sawit memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah di provinsi Aceh khususnya kabupaten Aceh Utara. Angka pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Utara saat ini mencapai 3.70 persen. Perkebunan kelapa sawit bernilai ekonomis yang cukup menentukan dan berperan penting dalam pembangunan, karena tanaman kelapa sawit dapat menyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara.

Dalam menumbuhkan berbagai industri pengolahan kelapa sawit perlu adanya integrasi dan optimalisasi dari berbagai elemen *stakeholder* di daerah ini, di samping itu, peran pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu dioptimalkan sehingga peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit akan meningkat secara signifikan. Maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan paralel dengan produktivitas tersebut.

Peran legislatif, eksekutif dan intelektual dari berbagai perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan publik (qanun Aceh Utara). Karena qanun tersebut merupakan landasan hukum (*legal standing*) untuk melindungi para pihak pelaku atau petani dan perusahaan perkebunan kepala sawit. Produksi kepala sawit di Kabupaten Aceh Utara baru pada tingkat memproduksi *Crute Palm Oil (CPO)* saja. Akan tetapi *Palm Kernel Oil (PKO)* belum tersentuh sama sekali. Pada hal PKO mempunyai nilai ekonomis lebih menjanjikan sebagai sumber pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Apabila PKO dapat diproduksi dengan baik, maka dengan sendirinya *multiplayer effect* ekonomi dengan peningkatan *added value* komoditi

kelapa sawit akan terwujud secara komprehensif di kabupaten Aceh Utara.

Desain strategi industri olahan kelapa sawit dapat dilakukan apabila kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, harga dan lain-lain, namun sampai saat ini kami sebagai peneliti belum ditemukan di lapangan hal-hal tersebut.

Akhirnya pada tempatnya disini penulis menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah ikut memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini. Di antaranya, Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, Yulius Darma. M.Si, selaku ketua LPPM Universitas Malikussaleh kepada mereka penulis berutang semangat.

Kemudian kepada mereka yang sangat penulis cintai: isteri, anak-anak, menantu dan cucu, tulisan ini penulis persembahkan. Mudah-mudahan anak penulis menjadi penulis yang handal.

Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita sekalian pada jalan yang benar. *Amin!*

Lhokseumawe, September 2015

Penulis:

Dr. Asnawi, SE., M.Si

Dr. Rasyidin, S.Sos.,M.A

Aiyub, SE, M.Ec

Amru Usman, SE. M.Sc

HALAMAN PENGESAHAN PENPRINAS MP3EI

Judul Penelitian : Desain Pengembangan Industri Olahan Kelapa Sawit Melalui Integrasi Dan Optimalisasi Peran Pemerintah, Swasta Dan Kalangan Intelektual (Studi Kabupaten Aceh Utara)

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 561 /Ekonomi Pembangunan
Koridor : Sumatera
Fokus Peneliti : Karet dan Kelapa Sawit

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Asnawi, S.E., M.Si
b. NIDN : 0008026410
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Studi Pembangunan
e. Nomor Hp : 081269188965
f. Alamat Surel (e-mail) : asnawiabd@yahoo.com

Anggota Peneliti 1

g. Nama Lengkap : Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A.
h. NIDN : 0006056107
i. Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Anggota Peneliti 2

j. Nama Lengkap : Aiyub, SE. M.Ec
k. NIDN : 0006127104
l. Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Anggota Peneliti 3

m. Nama Lengkap : Amru Usman, S.E., M.Sc., Ak
n. NIDN : 0013067607
o. Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh
p. Institusi Mitra :

Nama Institusi Mitra : Bappeda Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jln. Samudera No. 53 Lhokseumawe
Penanggungjawab : Ir. Zulkifli Yusuf, M.TP.
Lama Penelitian : 2 Tahun

Penelitian Tahun Ke : 2
Biaya Keseluruhan : Rp 400.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke DIKTI Rp. 200.000.000
- Dana Internal PT Rp. 0
- Dana Institusi lainnya Rp. 0
- Inkind Rp. 0

Mengetahui,
Ketua LPPM

Lhokseumawe, September
2015
Ketua Peneliti

Yulius Dharma, S.Ag., M.Si
NIP. 19750520 200212 1 002

Dr. Asnawi, S.E., M.Si
NIP. 196402082001121001

Menyetujui:
Rektor

Dr. Apridar, S.E., M.Si
Nip. 196704132001121001

RINGKASAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sektor kelapa sawit yang luas dengan produksi kelapa sawit rakyat sebesar 587.186 ton pertahun dan perkebunan besar, sebanyak 402.216 ton pertahun (2013). Dengan luas area karet tahun 2013 sebesar 75.355 hektar dan kelapa sawit sebesar 140.478 hektar. Potensi kelapa sawit di provinsi Aceh belum dikembangkan secara optimal untuk menjadi potensi andalan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan penciptaan *efek multiplayer* ekonomi dengan peningkatan *value added* hasil komoditi kelapa sawit belum sepenuhnya dilakukan sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya adalah disamping kekurangan mitra usaha, juga pengalokasian ke dalam program pembangunan sektor pertanian oleh pemerintah, khususnya kelapa sawit belum sepenuhnya terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendesain strategi pengembangan industri olahan kelapa sawit, (2). menyusun konsep penguatan kelembagaan perkebunan kelapa sawit, (3) mendesain strategi integrasi dan optimalisasi peran pemerintah, swasta dan kalangan intelektual.

TUJUAN KOMPETENSI UMUM (TKU)

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis kebijakan ekonomi, pembedayaan ekonomi, desain industri olahan kelapa sawit sebagai komoditi unggulan di kabupaten Aceh Utara.

TUJUAN KOMPETENSI KHUSUS (TKK)

Setelah mempelajari (membaca, meneafsirkan dan menganalisis) buku ini diharapkan :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan secara umum.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan produksi
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan marketing
4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan distribusi
5. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan harga
6. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan perkreditan
7. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penguatan kelembagaan
8. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi
9. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kemiskinan
10. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Crute Palm Oil (CPO)
11. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Palm Kenel Oil (PKO)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PENPRINAS MP3EI.....	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Urgensi Penelitian.....	2
BAB 2. LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Pendahuluan.....	3
2.2 Kebijakan publik.....	4
2.3 Kebijakan Ekonomi Pertanian di Indonesia.....	6
2.4 Kebijakan Subsidi (<i>Subsidi policy</i>).....	8
2.5 Kebijakan Produksi Pertanian.....	8
2.6 Kebijakan Harga Barang Pertanian.....	9
2.7 Kebijakan Investasi (<i>Investment Policy</i>).....	10
2.8 Kebijakan Investasi Publik.....	10
2.9 Kebijakan Makroekonomi yang Mempengaruhi Pertanian.....	11
2.10 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.2. Teori Kemiskinan.....	15
2.2.1. Karakteristik Kemiskinan.....	16
2.2.2. Penyebab Kemiskinan.....	17
2.2.3. Upaya pengentasan Kemiskinan.....	18
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1. Pendahuluan.....	21
3.2. Metode Penelitian.....	21
3.2.1 Kajian Literatur.....	21
3.2.2 Menentukan jadwal seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi.....	22
3.2.3 Evaluasi Pelaksanaan seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi.....	22
3.2.4 Penyusunan Laporan Penelitian.....	22

BAB 4. HASIL PENELITIAN	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Potensi Kelapa Sawit di Aceh.....	24
4.2 Integrasi dan Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan	26
4.2.1. Optimalisasi Peran Pemerintah	27
4.3. Penguatan Usaha Agribisnis Kelompok Tani	29
4.3.1. Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Kelembagaan Petani.....	29
4.3.2. Peningkatan Peran Organisasi Petani	29
4.3.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	30
4.4. Penguatan Koperasi Tani	30
4.5. Optimalisasi Peran Swasta	31
4.5.1 Optimalisasi Peran Akademisi.....	32
4.6. Desain Industri Olahan Kelapa Sawit.....	32
 DAFTAR PUSTAKA	 41
RIWAYAT HIDUP	46

*

BAB 1

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Utara, dimana angka pertumbuhan ekonomi kabupaten ini yaitu sebesar 3.70 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari sektor pertanian sebesar 2.71 persen, dimana sektor pertanian akan menjadi prioritas unggulan untuk dikembangkan dengan komidi andalan kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pemasarannya. Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 16.089 hektar, dengan produksi sebesar 20.977 ton dari perkebunan besar dan 158.619 ton dari perkebunan 20.977 perkebunan rakyat

Potensi kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara belum dikembangkan secara optimal untuk menjadi komoditi andalan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan *efek multipler* ekonomi dengan peningkatan *value added* hasil komoditi kelapa sawit belum sepenuhnya dikembangkan, sehingga kurang mampu menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya, adalah kekurangan mitra usaha, dan pengalokasian ke dalam program pembangunan sektor pertanian oleh pemerintah kabupaten Aceh Utara, khususnya kelapa sawit belum sepenuhnya terealisasi.

Hasil penelitian tentang *coloring economic model* (CEM) di provinsi Aceh oleh Asnawi at al (2013) menemukan bahwa Aceh memiliki potensi komoditi kelapa sawit yang luas, namun belum diolah secara optimal dan hanya sebatas pengolahan produk turunan pertama yaitu *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel Oil*. Pada hal untuk menciptakan optimalisasi pemanfaat produk kelapa sawit dalam meningkatkan lapangan kerja begitu luas dan dapat dilakukan dengan mengembangkan produk turunan, yang tidak hanya pada produk turunan tingkat pertama saja. Berdasarkan hal tersebut di atas maka di pandang perlu mendesain pengembangan industri olahan kelapa sawit dengan mengikutsertakan, menintegrasikan dan mengpotimalkan peran pemerintah, swasta dan kalangan intelektual sebagai motor penggerak penumbuhan ide dan pendampingan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini telah merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Membangun kontruksi model pengembangan industri olahan kelapa sawit dengan peningkatan peran sektor terkait.
- 2) Berusaha memberi masukan dan membuka sudut pandang pemerintah untuk berperan aktif melalui kebijakan dan anggaran pembangunan
- 3) Mendorong Swasta untuk berperan membangun dan mendayagunakan modal yang dimiliki untuk pengembangan industri olahan sawit.
- 4) Berusaha menjadikan kalangan intelektual sebagai warga kampus untuk ikut berperan sesuai kompetensinya dalam mendorong pengembangan industri olahan kelapa sawit melalui pendampingan dan pengembangan manajemen.
- 5) Menambah referensi ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melalui penerbitan artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi tingkat nasional dan internasional.

1.3 Urgensi Penelitian

Kajian ini menjadi penting karena sekurang-kurangnya telah menemukan 2 urgensi yang menjadi teras dan pertimbangan bagi pelaksanaan kajian ini, yaitu:

1. Hasil kelapa sawit, tidak diolah di lokasi produksi, tetapi dijual dalam bentuk bahan mentah ke Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Aceh Utara masih kurang terdapatnya sarana pengolah untuk menciptakan *value added* dari komoditi kelapa sawit, sehingga pendapatan masyarakat dari produksi kelapa sawit masih rendah, hal ini berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan dan bahkan peningkatan angka kemiskinan.
2. Peran serta pemerintah masih sangat minim dalam mendukung tercipta industri olahan kelapa sawit sehingga pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat berkurang.

*

B A B 2

LANDASAN TEORI

2.1. Pendahuluan

Kebijakan merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan bernegara, karena dengan kebijakan tersebut akan menuntun terbentuk daerah yang baik. Keberhasilan sebuah kebijakan daerah selalu berhubungan erat dengan kapabilitas normative dari sistem politik yang diterapkan di Negara tersebut. Negara akan kuat dan berwibawa baik dengan masyarakat sendiri maupun dengan masyarakat internasional. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura maupun Negara maju lainnya sangat diperhitungkan oleh Negara lain, ini tidak lain karena kapabilitas sistem politiknya sangat baik sehingga dalam memformulasikan kebijakan publikpun didukung oleh seluruh elemen masyarakatnya.

Kebijakan daerah sangat erat kaitannya dengan sistem politik dan hasilnya juga berkaitan dengan *good governance*. Apabila kebijakan daerah berkualitas penegakan *good governance* dalam Negara tersebut dengan mudah dapat dijalankan. Etika politik juga akan mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, jika etika politik tidak mampu menuntun para aktor politik, maka kebijakan publik tidak pernah mendapatkan dukungan dari pada masyarakat tidak percaya (*distrust*). Akibat dari tidak berkualitas kebijakan publik, maka banyak terjadi demonstrasi dan unjuk rasa menentang kebijakan publik tersebut, ini merupakan indikator tidak berkualitas *out come politic* sebuah Negara.

Bagaimana mungkin sebuah Negara yang kebijakan publiknya tidak bermutu untuk mencapai *good governance* ini merupakan hal yang mustahil. Untuk membentuk *good government* dasarnya adalah kebijakan publik yang baik. *Good governance* merupakan cita-cita semua penduduk dunia, oleh karena itu penerapan *good governance* ini menjadi kewajiban disetiap sebuah Negara. Dalam konsep *good governance* ini harus di dukung oleh kebijakan publik yang mempunyai kredibilitas yang baik pula. Pemerintah yang baik ialah pemerintahan yang mementingkan kebutuhan masyarakat banyak lebih utama dibandingkan kebutuhan lainnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah, atau *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota organisasi/lembaga dan *policy maker* yang mampu membaca kebutuhan masyarakat sehingga dapat direfleksikan dalam pembuata kegiatan publik. Di samping itu perlu mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik (masyarakat). Dengan demikian, kebijakan publik mampu mewujudkan hal-hal yang penting dalam upaya mewujudkan *good governance* di dalam sebuah Negara.

2.2 Kebijakan publik

Berbagai literature diungkapkan bahwa kebijakan publik sering dikenal dengan sebutan *publik policy* berarti aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah komunitas atau masyarakat bahkan Negara yang harus ditaati dan berlaku kepada seluruh warganya. Menurut Carl L.Friedrick dalam Riant Nugroho (2009 : 83-84) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut untuk memanfaatkan potensi sekaligus hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manakala mengikut pendapat yang dikemukakan oleh Thomas R Dye dalam Riant Nugroho (2009 : 84) kebijakan publik merupakan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (*Publik policy*) adalah "Pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132).

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa adalah : Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah (Santosa, 1988:5).

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Policy Implementation*, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu : (1). Lingkungan perumusan kebijakan (*Formulation*), (2) Lingkungan penerapan (*Implementation*), dan (3) Lingkungan penilaian (*Evaluation*) kebijakan.

Berdasarkan pendapat para pakar diatas, bahwa aturan atau peraturan secara sederhana dapat difahami sebagai kebijakan publik, dengan demikian kebijakan publik dapat berarti sebagai sebuah produk politik yang bernilai hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum, namun harus difahami secara *comprehensive* dan benar tentang kebijakan tersebut. Dengan demikian kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan *good governance*, karena ianya adalah produk dari proses politik yang ada dalam sebuah Negara. Sementara itu definisi yang dinyatakan oleh Thomas R. Dye di atas, bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apa manfaat bagi kehidupan bersama, dan ini harus

menjadi pertimbangan utama atau holistic agar kebijakan tersebut menjadi lebih berguna bagi masyarakat umum.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh PBB dalam Solichin Abdul Wahab (2002 : 1) *Policy* (kebijaksanaan) adalah berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Jadi menurut definisi ini kebijakan atau kebijaksanaan merupakan pedoman atau panduan bagi sebuah organisasi seumpama Negara yang didalamnya terdapat program-program, aktivitas-aktivitas serta rencana yang perlu diambil dalam mewujudkan program-program yang telah telah disusun sebelumnya. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh W.I Jenkins (1978 : 15) kebijaksanaan (*Policy*) *a set of interrelated decisions taken by a political aktor or group of political aktors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where the these decisions should, in principle, be within the power of these aktors to achieve.* (Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah disepakati beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut). Oleh karena itu kebijakan publik mengandung berbagai keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan Negara atau kebutuhan Negara yang hendak diberikan kepada warganya.

2.3 Kebijakan Ekonomi Pertanian di Indonesia

Kebijakan pertanian di Indonesia, adalah tindakan pemerintah untuk mempercepat memajukan sektor pertanian yang merupakan sektor matapencaharian yang hampir 80 persen penduduk Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan ekonomi pertanian di Indonesia didapati kendala-kendala, yaitu : (a) kendala penawaran dan produksi adalah ketersediaan sumber daya alam (lahan, tenaga kerja dan alam), teknologi, harga input dan kemampuan manajemen, dimana komponen-komponen tersebut merupakan variabel produksi yang membatasi kemampuan untuk menghasilkan komoditas pertanian, (b) permintaan dan komsumsi yang dibatasi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera dan harga output, yang merupakan variabel-variabel fungsi pemerintah yang membatasi komsumsi produk pertanian, (c) harga komoditi pertanian, yang diperdagangkan baik input maupun output yang membatasi ekspor dan suplai domestik (Aziza, 2008). Kebijakan pertanian bukan saja dalam bentuk kebijakan pengatur dan peningkatan

produksi pertanian, namun juga dalam bentuk peningkatan distribusi dan diversifikasi produk-produk pertanian, yaitu : (1) kebijakan yang bersifat pengatur (*regulating policies*), dan (2) kebijakan yang bersifat pemerataan (*distributive policies*) (Rita, 2010). Agar kebijakan pertanian di Indonesia dapat terimplementasi dengan tepat serta berdampak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka kemiskinan dan dapat mempercepat penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian. Aziza (2008) mengemukakan ada beberapa strategi dalam menyusun kebijakan pertanian, yaitu : (1) akses terhadap kepemilikan tanah, yaitu penataan tentang struktur kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi yang memerlukan aksi nyata dari pemerintah daerah, sehingga akan mempermudah penyediaan sarana tersebut, (c) akses terhadap pasar, ketiadaan pasar, mata rantai distribusi pemasaran barang-barang pertanian serta peluang pemasaran barang-barang pertanian. Kementerian Pertanian (2014) mengemukakan isu strategis dalam penyusunan kebijakan pertanian di Indonesia adalah; (1) Kecukupan produksi komoditas strategis serta pengurangan ketergantungan impor, (2) Peningkatan daya saing produk di dalam negeri dan di dunia internasional, (3) Diversifikasi pangan dan (4) Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Rita (2010) mengemukakan tujuan dibuat Kebijakan pertanian di Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan pertanian dalam rangka mengatasi kebutuhan pangan, dan mempercepat menumbuhkan industri pertanian dalam menyediakan bahan pangan secara berkesinambungan (*sustainable*) dibidang pangan. Secara lebih terinci tujuan kebijakan pertanian di Indonesia, adalah ; (1) memajukan pertanian, yaitu kebijakan untuk mengatasi masalah pertanian sebagai sumber pangan, baik masalah yang menyangkut produksi, pasca panen dan distribusi; (2) untuk menjadikan sektor pertanian agar lebih produktif, yaitu bagaimana usaha dalam peningkatan hasil produksi, dengan mendorong sistem produksi modernisasi dengan menerapkan kelebihan teknologi pertanian dalam produksi; (3) meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian, dengan adanya kebijakan pertanian dapat menurunkan biaya produksi pertanian dengan bantuan penyuluhan dan subsidi terhadap pupuk dan obat-obatan, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Aziza (2008) juga mengemukakan tujuan dasar kebijakan pertanian di Indonesia, adalah (a) tujuan efisiensi, dimana apabila sumber daya ekonomi yang langka dengan keberadaannya mampu menghasilkan yang optimal, sehingga menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi, (b) pemerataan yang

menjadi target distribusi diantara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target kebijakan, (c) ketahanan pangan akan meningkatkan stabilitas politik, agar mampu meminimumkan *adjustment cost*. Ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau. Adapun kebijakan pertanian di Indonesia dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

2.4 Kebijakan Subsidi (*Subsidi policy*)

Subsidi yaitu bantuan atau pembayaran sebahagian yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat, untuk meringankan harga beli dari komoditi pertanian dan lainnya. Kebijakan subsidi di bidang pertanian, yaitu kebijakan harga, dimana kebijakan yang berbentuk transfer anggaran pemerintah kepada rakyat, sebagai contoh subsidi menyedian input produksi, seperti pupuk, benih, kebijakan subsidi juga diberikan kepada rakyat dibidang pertanian terhadap harga, yaitu harga lebih tinggi dibeli oleh pemerintah terhadap komoditi pertanian masyarakat atau sebaliknya harga lebih rendah yang dibeli oleh masyarakat terhadap barang-barang pertanian yang merupakan barang kebutuhan pokok, seperti beras, subsidi pupuk.

2.5 Kebijakan Produksi Pertanian

Peningkatan produksi pertanian diperlukan untuk tujuan penyediaan pangan, peningkatan produksi dapat menjamin ketersediaan pangan dan keberlanjutan kesediaan pangan. Suplai pangan yang stabil didapatkan dari proses produksi yang tidak terhambat dengan ketersediaan dan peningkatan biaya produksi, tenaga kerja, luas lahan dan penerapan teknologi. Diperlukan kebijakan pemerintah, baik ditingkat pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup (ketahanan pangan) dan mengatasi permasalahan pangan, berawal dari tingkat proses produksi yang tidak optimal, hambatan-hambatan proses produksi dan meningkatnya biaya produksi. Sementara konsumsi pangan yang berasal dari sektor pertanian terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola kesadaran kesehatan terhadap konsumsi makanan. Permasalahan pangan juga pada harga pangan yang kurang terjangkau karena perubahan struktur ekonomi dan kelangkaan tersedia pangan.

Kebijakan tentang produksi pertanian adalah untuk menjamin ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara merata, agar masyarakat dapat mencapai swasembada pangan, Menurut Rita (2010)

kebijakan-kebijakan ketahanan pangan dan swasembada pangan berbentuk : (1)Kebijakan bidang pembenihan (2) Sarana produksi, pupuk, dan pestisida (3). Kebijakan bidang perkreditan (4) Kebijakan bidang pengairan (5) Kebijakan diseversifikasi usaha tani (6). Kebijakan bidang penyuluhan (7) Kebijakan harga input dan output (8) Kebijakan penanganan pasca panen

2.6 Kebijakan Harga Barang Pertanian

Penentuan harga barang pertanian mencerminkan berbagai biaya produksi, baik dalam bentuk biaya tetap (fixed cost) maupun dalam bentuk variabel cost yang dikeluarkan petani dalam menghasilkan barang-barang pertanian, tingginya biaya produksi akan menyebabkan harga output meningkat, sehingga tidak terjangkau kepada daya beli konsumen barang pertanian. Penyusunan kebijakan tentang harga komoditi pertanian sangatlah spesifik terhadap jenis barang pertanian itu sendiri, jadi kebijakan tentang harga komoditi pertanian tidak umum, oleh karena itu diperlukan analisis yang mendalam terhadap sifat-sifat barang pertanian dalam membuat kebijakan harga barang-barang pertanian tersebut, sebagai contoh kebijakan dalam menentukan harga beras, berbeda dengan kebijakan dalam menentukan harga kelapa sawit.

Analisis kebijakan dalam menyusun harga barang-barang pertanian, harus ditempuh dalam beberapa mekanisme, yaitu; (1) mekanisme harga dasar, adalah harga berdasarkan biaya produksi, apabila harga diatas biaya equilibrium, akan memberi dampak yang efektif terhadap penjualan. Harga dasar yang efektif mengakibatkan kelebihan penawaran sehingga terdapat surplus beras yang tidak terjual, (2) mekanisme harga tertinggi, yang merupakan mekanisme harga maksimum yang bertujuan melindungi petani, dimana membeli pada waktu panen (*excess supply*) dan menjualnya pada waktu stok yang berkurang (*excess demand*). (3) Mekanisme harga perangsang, adalah untuk mengatasi impor komoditi pertanian, yang bertujuan agar petani lebih terangsang untuk memproduksi barang pertanian, dalam menjamin dan meningkatkan stok barang pertanian domestik. Kalau stok barang pertanian nasional menipis, sedangkan permintaan melebihi (*Excess demand*), maka harus diimpor, dan hal ini akan mengurangi devisa, (4) kebijakan Pemasaran adalah kebijakan untuk meningkatkan margin pemasaran (bahagian laba yang didapatkan) produksi (Rita, 2010).

2.7 Kebijakan Investasi (*Investment Policy*)

Kebijakan investasi adalah untuk merangsang dan mempercepat perlakuan penanaman modal di Indonesia di berbagai bidang, termasuk di bidang pertanian. Kebijakan investasi di Indonesia dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan dukungan dari departemen-departemen teknis terkait. BKPM menetapkan skala prioritas untuk usaha tertentu, misalnya pembukaan usaha besar diharapkan menghindari persaingan dengan usaha petani (Rita,2009). Kebijakan menumbuhkan dan merangsang investasi di bidang pertanian berupa kebijakan-kebijakan menumbuhkan investasi di bidang penyediaan input produksi pertanian dan berupa kebijakan-kebijakan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan kebijakan peumbuhan industri modifikasi dan produk-produk turunan dari barang-barang pertanian.

2.8 Kebijakan Investasi Publik

Investasi publik adalah penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih maju, investasi publik dibiayai oleh APBN ataupun APBD ditingkat daerah. Kebijakan investasi publik diatur ke dalam tiga bentuk, yaitu ; (1) kebijakan dalam membiayai modal kepada petani, keterbatasan modal dari petani dalam mengusahakan lahan pertanian merupakan kesulitan yang besar, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa kemudahan kredit modal untuk penggarapan lahan pertanian, (2) kebijakan dalam membangun infrastruktur pertanian, apabila infrastruktur pertanian telah ada, seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, pelabuhan dan infrastruktur pendukung lainnya, maka produktivitas usaha pertanian akan meningkat, karena infrastruktur merupakan barang modal penting yang berupa *barang-barang publik*.(3) kebijakan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan keahlian (Skil) petani, kebijakan ini akan menghasilkan manfaat dalam jangka panjang, seperti kebijakan tentang peningkatan keahlian penyuluh pertanian, investasi dalam sekolah pertanian (SPMA), kegiatan magang sekolah lapang (SL), dan dalam bentuk kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan output hasil pertanian (Aziza, 2008).

2.9 Kebijakan Makroekonomi yang Mempengaruhi Pertanian.

Kebijakan makroekonomi, sifatnya agregat yang mempengaruhi keseluruhan wilayah Indonesia dan akan mempengaruhi seluruh komoditas tak terkecuali komoditas pertanian. Kebijakan makroekonomi, dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, antara lain, adalah; (1) kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel fiskal di Indonesia, seperti kebijakan tentang kenaikan pajak dan subsidi yang sangat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi penjualan barang-barang pertanian, (2) kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diatur oleh bank Indonesia yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana sektor pertanian adalah sektor riil yang memberi sumbangnn kepada pertumbuhan ekonomi, dimana kebijakan moneter mempengaruhi kepada kemajuan sektor pertanian, misalnya kebijakan yang mengatur pergerakan suku bunga deposito, dapat mempengaruhi terhadap inflasi dan peningkatan investasi di bidang pertanian selanjutnya kebijakan tentang kredit perbankan usaha kecil dan menengah di bidang investasi pertanian, juga dapat menumbuhkan usaha pertanian yang lebih berkemban, (3) kebijakan nilai tukar, dimana deregulasi (kebijakan) tentang nilai tukar matauang Rupiah dengan matauang asing, ini sangat mempengaruhi ekspor-impor barang-barng pertanian (Aziza, 2008). Tujuan deregulasi (kebijakan), yaitu penyesuaian nilai tukar rupiah dengan matauang asing (dollar) misalnya, untuk menguatkan nilai tukar rupiah, maka akan meningkatkan ekspor barang-barang, tak terkecuali barang pertanian dan akan mengurangi impor, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara, (4) kebijakan faktor produksi domestik, yaitu menyangkut dengan lahan, tenag kerja dan modal. Kebijakan tentang sewa lahan sangat mempengaruhi kepada peningkatan produksi pertanian, sebab lahan merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi output pertanian. Kebijakan tentang upah minimum pekerja dan kebijakan tentang bunga modal investasi dibidang pertanian juga sangat signifikan mempengaruhi produktivitas hasil pertanian.

2.10 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan mengikuti perkembangan waktu. Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari mazhab historismus, yaitu Frederich List (1940) dalam Lincolin Arsyad (1999) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan

lingkungan kebudayaan. Selanjutnya, Bruno Hildebrand (1848) dalam Lincolin Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, tetapi pada cara distribusi yang digunakan.

WW Rostow (1960) dalam Lincolin Arsyad (1999) mengemukakan proses perkembangan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 5 tahap, yaitu (1) masyarakat tradisional; (2) prasyarat untuk tinggal landas; (3) tinggal landas; (4) menuju kedewasaan dan tahap ke (5) tahap konsumsi tinggi

Ekonomi dalam masyarakat tradisional terjadi masih dalam struktur perekonomian yang *primitive* yang kehidupan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional. Pada tahap pertumbuhan ekonomi pra syarat tinggal landas yaitu sebagai suatu masa transisi, dimana masyarakat sudah mencapai pertumbuhan ekonomi atas kekuatan sendiri. Pada tahap tinggal landas, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru. Pada tahap pertumbuhan ekonomi masa kedewasaan, dimana masyarakat telah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi dan pada tahap konsumsi tinggi, pada tahap ini masyarakat telah memikirkan konsumsi yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi *mazhab klasik* adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dalam Yunita Setyawati (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang disebabkan oleh dua faktor, yaitu; (a) sumber daya alam yang tersedia, (b) kualitas sumber daya manusia dan (c) stok barang modal, sedangkan faktor yang kedua adalah faktor pertumbuhan penduduk. Sumber daya alam merupakan wadah yang mendasar diperlukan untuk meningkatkan kegiatan produksi, sedangkan sumber alam yang tersedia adalah batas minimum untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dari suatu masyarakat (Lincolin Arsyad, 1999). David Ricardo (1917) dalam Lincolin Arsyad (1999) menyebutkan peranan teknologi dalam meningkatkan produktivitas kerja di sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi tercapai dan dapat memperlambat *the law of diminishing return*, yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menurut Solow-Swan (1950) dalam Lincolin Arsyad (1999) menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor

produksi, tenaga kerja dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan pandangan teori ini pertumbuhan ekonomi pada tingkat perekonomian yang full employment dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi dalam mazhab Keynesian adalah Teori Pertumbuhan ekonomi Horrod-Domar (1947) dalam Sadono Sukirno (1994) yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang, adalah : (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal produksi (capital output rasio) tetap dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi Horrod-Domar (1947) dalam Todaro terjemahan Abdullah (1993) dapat dirumuskan sebagai berikut;

Kita anggap bahwa nisbah jumlah output terhadap modal yang dapat direproduksi tetap, yaitu;

$$K(t)=kY(t) \quad (1)$$

di mana $K(t)$ adalah cadangan modal pada waktu t , $Y(t)$ adalah jumlah output (GNP) pada waktu t . k adalah rata-rata nisbah modal-Output. Kemudian dengan asumsi suatu output yang tetap (Y) selalu ditabung (S), maka :

$$I(t) = K(t+1) - K(t) + \partial K(t) = sY = S(t) \quad (2)$$

di mana $I(t)$ adalah investasi kotor pada waktu t dan ∂ adalah bagian cadangan modal yang mengalami depresiasi pada masing-masing periode. Apabila g sebagai target tingkat pertumbuhan output, maka menjadi :

$$g = [Y(t+1) - Y(t)] / Y(t) = \Delta Y(t) / Y(t) \quad (3)$$

kemudian, modal harus berkembang dengan tingkat yang sama, karena dari persamaan (1) kita mengetahui bahwa :

$$\Delta K / K = k \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{k \Delta Y}{\frac{K}{Y}} = \frac{\Delta Y}{Y}$$

Dengan menggunakan persamaan (2) kita telah sampai pada dasar pertumbuhan ekonomi Horrod-Domar (dengan menggunakan parameter depresiasi modal):

$$g = \frac{sY - \partial K}{K} = \frac{s}{k} \partial \quad (3a)$$

Akhirnya, karena pertumbuhan output dapat dinyatakan sebagai jumlah pertumbuhan angkatan kerja (n) dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja (p), maka persamaan (3a) dapat ditulis ulang untuk kegunaan perencanaan, sebagai berikut:

$$n + p = \frac{s}{k} - \partial \quad (4)$$

dengan harapan tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat pertumbuhan produktivitas, persamaan (4) dapat digunakan untuk memperkirakan apakah tabungan dalam negeri akan cukup menyediakan kesempatan kerja bagi pertumbuhan angkatan kerjanya atau tidak. Suatu cara untuk mengetahui hal ini adalah dengan merinci seluruh fungsi tabungan ($S = sY$) dengan dua sumber komponen tabungan, yaitu kecenderungan untuk menabung (*propensity to save*) dari pendapatan upahnya (W) dan pendapatan dari keuntungan (π), Oleh karena itu, kita dapat tetapkan $W + \eta Y$ dan

$$S\pi + Sw = I \quad (5)$$

Dimana $S\pi$ dan Sw adalah kecenderungan menabung dari π dan W masing-masing. Dengan memanipulasi persamaan (3a) dan menggantikannya dengan persamaan (5), maka kita sampai pada modifikasi persamaan pertumbuhan Horrod-Domar, sebagai berikut:

$$k(g+\partial) = (S\pi - Sw) (\pi/Y) + Sw \quad (6)$$

yang kemudian dapat digunakan sebagai perumusan untuk mendapatkan jumlah tabungan yang memadai dari keuntungan dan pendapatan upah/gaji.

Sadono Sukirno (1994) mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, adalah melihat ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \quad (7)$$

di mana ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, ΔK adalah tingkat pertumbuhan barang modal dan ΔL adalah tingkat pertumbuhan teknologi. Sedangkan Solow (1950) dalam Sadono Sukirno (1994) membentuk teori pertumbuhan ekonomi, adalah:

$$G = m \Delta K + b \Delta L + \Delta T \quad (8)$$

di mana g adalah tingkat persentase pertumbuhan ekonomi, m adalah produktivitas modal marginal dan b adalah produktivitas marginal tenaga kerja. Dari persamaan (7) dan (2), maka tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung kepada; (a) penambahan modal dan produktivitas modal marginal, (b) penambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal dan (c) perkembangan teknologi.

Schumpeter (1939) dalam Lincoln Arsyad (1999) faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan inovasi yang dilakukan oleh para *entrepreneur*, kemajuan ekonomi tersebut dapat diartikan dengan peningkatan output dalam masyarakat.

2.2. Teori Kemiskinan

Seiring dengan semakin kompleknya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melengkapinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Bila dilihat dari sudut teori, kemiskinan ditimbulkan oleh kemiskinan natural, yaitu miskin tidak memiliki sumber daya alam. Miskin struktural adalah miskin yang diciptakan oleh struktural manajemen pengelolaan pemerintahan dalam pembangunan yang tidak tepat dan miskin warisan merupakan miskin keturunan, sejak dilahirkan sudah miskin (Oscar Lewis, Selo Sumarjan, 1977).

Hall dan Midgley (2004) menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relative dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

John Friedman, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi modal yang produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan dan peralatan) sumber-sumber

keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, ketrampilan yang memadai dan informasi yang berguna (John Friedman, 1979).

Kemiskinan memiliki potensi ekonomi, sosial budaya dan politik. Dimensi yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia, seumpama pangan, sandang dan sebagainya. Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, dan ketidakberdayaan. Dalam katagori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan. Sedangkan dimensi politik, kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka yang menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya.

2.2.1. Karakteristik Kemiskinan

Di kebanyakan Negara-negara yang sedang membangun, kemiskinan sebahagian besar dialami masyarakat pedesaan. McQuibria (dalam Hasibuan, 1977) mengemukakan karakteristik kemiskinan di Asia Tenggara dan Asia Selatan adalah; (a) kemiskinan lebih banyak dialami di pedesaan daripada perkotaan; (b) kemiskinan berkorelasi positif dengan anggota keluarga dan berkorelasi negative dengan jumlah pekerjaan dalam suatu keluarga; (c) kemiskinan ditandai oleh rendahnya pemilikan asset keluarga; (d) pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi rumah tangga miskin; (e) kemiskinan berkaitan dengan masalah social budaya yang dinamis.

Kemiskinan yang terjadi di Negara yang sedang membangun, karena munculnya penyebab kemiskinan dari beberapa variable yang saling berkorelasi satu sama lain. Kemiskinan sangat erat hubungannya dengan terselenggaranya pertanian yang tradisional di negara berkembang, yang memiliki anggota keluarga yang relative banyak dengan tingkat produktivitas rendah. Kemiskinan terjadi karena pendapatan keluarga yang rendah dan memiliki harta atau sumber daya sebagai modal untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang rendah.

Edwina et al (2003) menyebutkan kemiskinan dapat berupa kemiskinan mutlak maupun kemiskinan relative, mengandung pengertian secara sempit maupun secara luas. Kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang umumnya diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Kemiskinan suatu fenomena dan penyakit social dalam masyarakat sebuah Negara. Dampak dari kemiskinan adalah dapat membatasi rakyat untuk memperoleh pekerjaan dan hak rakyat untuk mengakses kebutuhan hidup, selain itu dampak kemiskinan tidak dapat memperoleh pendidikan, membiayai kesehatan, pengangguran yang semakin meningkat dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi pangan, sandang dan papan.

Oscar Lewis (dalam Antjok, 1995) mengemukakan kemiskinan adalah penderitaan ekonomi dalam bentuk enam kondisi, yaitu; (1) system ekonomi uang, buruh upahan dan system produksi untuk keuntungan; (2) pengangguran dan pengangguran tenaga skil; (3) upah buruh rendah; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status social; (5) system keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Sifat kemiskinan lebih ditekankan pada penguasaan factor-faktor produksi, dimana kemiskinan golongan bawah lebih ditekankan pada buruh upahan yang memiliki skil yang rendah dalam bekerja. Namun demikian kemiskinan juga bisa terjadi pada golongan pekerja yang memiliki skil, namun tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skil yang dimilikinya. Fenomena kemiskinan juga masih kuat terjadi pada masyarakat yang menganut system kelas social, dimana golongan kelas tinggi lebih banyak menguasai factor-faktor produksi, karena memiliki otoritas, kalau dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah dengan sedikit menguasai faktor-faktor produksi.

2.2.2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan adalah sangat tergantung pada potensi dan kondisi yang terjadi pada suatu Negara atau wilayah yang miskin. Thamrin (1999) mengemukakan penyebab kemiskinan ada dua aspek, yaitu; (1) *market failur* yaitu kemiskinan terjadi karena sebahagian masyarakat desa dengan angkatan kerja yang menerima upah rendah, sehingga tidak memenuhi kebutuhan standar hidup, sempitnya peluang usaha di pedesaan, untuk pengembangan produksi di desa tidak memadai infrastruktur, pola penguasaan tanah timpang di desa dan pemasaran hasil komoditi pedesaan kurang lancer; (2) *political failure* yaitu apabila struktur dan lembaga ekonomi yang ada pada aras supra local telah menyebabkan distorsi terhadap kepentingan rakyat.

Ramli (2011) mengemukakan sebab-sebab munculnya kemiskinan, *pertama* kemiskinan kebudayaan, biasanya disebabkan oleh kesalahan pada subyeknya, seperti tidak percaya diri, malas dan tidak memiliki jiwa wiraswasta; *kedua* yaitu dimensi mezzo adalah

lemahnya kepercayaan social di dalam suatu komunitas dan organisasi, ketiga, yaitu dimensi makro adalah ketidakadilan pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota); *keempat* yaitu dimensi global ketidakseimbangan antara Negara berkembang dengan Negara maju.

Menurut pendapat Ramli, kemiskinan lebih disebabkan oleh oleh factor kesenjangan, dimana kemiskinan di Negara berkembang adalah kesenjangan masyarakat yang tidak memiliki jiwa hidup mandiri atau jiwa *entrepreneur* kalau dibandingkan dengan Negara maju yang sebahagian besar masyarkatnya memiliki jiwa hidup mandiri. Disamping itu di Negara berkembang terjadi kesenjangan yang besar antara kehidupan masyarakat kota yang memiliki banyak fasilitas produksi dan lapangan kerja bila dibandingkan dengan masyarakat desa yang kurang memiliki fasilitas usaha ekonomi, juga kalau dibandingkan dengan masyarakat Negara maju tingkat kesenjangan masyarakat kota dan desa sudah hampir merata.

2.2.3. Upaya pengentasan Kemiskinan

Upaya Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskian. Kemiskinan belum dapat terkikis hingga sekarang ini, hal ini disebabkan oleh kebijakan dan keterlibatan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum begitu tepat yang sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat diwilayah yang terkena miskin.

Antjok (1995) mengemukakan strategi pengentasan kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga pokok pertanian yang memadai serta penciptakan lapangan kerja; (2) investasi pelayanan dalam bidang infrastruktur fisik dan social; (3) penyediaan teknologi bagi si miskin; (4) peran kelembagaan yang efektif.

Menjalankan tiga strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah produksi pertanian dengan kebijakan menjaga harga komoditi pertanian masyarakat miskin harus stabil, sehingga daya beli petani meningkat, disamping penyediaan infrastruktur untuk peningkatan produksi, seperti irigasi dan jalan, juga dengan penerapan dan penyediaan inovasi dan teknologi pertanian unrtuk peningkatan produksi masyarakat miskin.

Starhm (1999) mengemukakan tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu; (1) pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas; (2) tatanan ekonomi baru; (3)

pembangunan mandiri. Selanjutnya, Mahmed (1995) mengemukakan dua cara untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu ; (1) kebijakan populasi penduduk dengan penekanan angka kelahiran dan (2) industrialisasi *big push* yang mendorong perubahan dari golongan berpendapatan rendah menuju ke pendapatan tinggi.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah sebagai pemegang otoritas tidak boleh sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan merangkul NGOs, akademisi, pihak swasta dan partai politik dalam menyusun suatu model kebijakan yang tepat untuk pengentasan kemiskinan agar mencapai sasaran. Hettne (1985) mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, upaya yang dilakukan adalah menumbuhkan kemandirian dan kemampuan penduduk miskin agar terlepas dari ketergantungan. Pendekatan pengentasan kemiskinan menurut pendapat tersebut lebih difokuskan untuk menciptakan *human capital* yaitu kemampuan dan kemandirian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat, adalah modal dasar dalam pengentasan kemiskinan di suatu wilayah atau Negara.

Korten (1998) dalam Tjokroaminoto (1996) mengemukakan dua pendekatan pengentasan kemiskinan yang berwawasan manusia, yaitu; (1) *production centered development* adalah lebih mengutamakan manusia sebagai instrument pembangunan dan factor produksi; (2) *people centered development* yaitu kemampuan pemberdayaan manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

*

This page is intentionally left blank

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendahuluan

Adapun tujuan penelitian tahun ini adalah untuk (1) mendesain strategi pengembangan industri olahan kelapa sawit, (2). menyusun konsep penguatan kelembagaan perkebunan kelapa sawit, (3) mendesain strategi integrasi dan optimalisasi peran pemerintah, swasta dan intelektual, dan (4) dan melakukan seminar dan publikasi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3.2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini seperti yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

3.2.1 Kajian Literatur

Pada tahapan ini peneliti akan melakukan studi literatur berhubungan dengan teknik strategi pengembangan industri olahan sawit. Bahan kajian yang akan menjadi rujukan adalah buku teks, artikel ilmiah, pendapat ahli, studi dokumentasi dan lain-lain-lain. Tujuan pada tahapan ini adalah untuk :

- a. Sebagai landasan bagi mendesain strategi pengembangan industri olahan kelapa sawit
- b. Sebagai landasan bagi menyusun konsep penguatan kelembagaan perkebunan kelapa sawit
- c. Sebagai landasan bagi penyusunan strategi integrasi dan optimalisasi peran pemerintah dan swasta serta intelektual

3.2.2 Menentukan jadwal seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi

Tahap penelitian ini, adalah penentuan jadwal, pelaksanaan seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi dengan pemerintah, swasta dan kalangan intelektual yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi untuk melahirkan industri olahan.

3.2.3 Evaluasi Pelaksanaan seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi

Pada tahap penelitian ini, tim peneliti mengevaluasi hasil pelaksanaan seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Disamping, untuk mengetahui hambatan, evaluasi tim peneliti bertujuan untuk mengetahui keakuratan hasil seminar, lokarkarya dan diskusi-diskusi.

3.2.4 Penyusunan Laporan Penelitian

Pada tahap laporan penelitian, dimana semua data yang telah dikumpulkan baik data dari referensi secara teoritis ataupun data primer dan sekunder, kemudian dianalisis dan disusun menyadi suatu bentuk karya ilmiah yang sisitematis Kemudian pada tahap ini, laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dipublikasikan melalui seminar hasil penelitian.



Gambar 4.1 Tahapan Metode Penelitian

*

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Utara terletak pada 96.52.00-97.31.00 BT dan 04.46.00-05.00,40 LU, dengan luas wilayah 3.296,86 Km² dan jumlah penduduk, sebanyak 529,751 jiwa, dengan kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara, sekitar 161 jiwa/km² yang tersebar di seluruh kecamatan (2012). Kabupaten Aceh Utara, berbatasan; sebelah utara dengan kota Lhokseu mawe dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Benar Meriah, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bireuen. Secara Administratif Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan, dengan 70 kemukiman serta 582 jumlah gampong. Sebahagian wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dataran dengan kondisi geografis dan topografis yang berbeda-beda.

Kabupaten Aceh Utara memiliki beberapa keunggulan di bidang sumber daya alam. Di sektor pertambangan menghasilkan gas alam. Sektor lainnya yang turut mendukung perekonomian Kabupaten Aceh Utara, yaitu sektor tanaman pangan, pertanian dan perkebunan serta sector perikanan. Kabupaten Aceh Utara mempunyai flora dengan berbagai jenis tumbuhan, yaitu; kayu merbau, damar, damar laut, semantok, meranti, cemara dan kayu bakau. Semua jenis tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan kekayaan dan potensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Sedangkan dibidang fauna Kabupaten Aceh utara memiliki kekayaan berbagai jenis binatang, yaitu gajah, badak, orang utan, harimau dan rusa.

Kabupaten Aceh Utara memiliki komoditas tanaman perkebunan, sebanyak 16 komoditi, diantaranya; kakao, cengkeh, karet dan kelapa sawit. Tahun 2012 komoditi perkebunan mengalami peningkatan dalam produktivitas, yaitu cengkeh meningkat (7,5 ton), karet (4471,7 ton), kelapa sawit (8,2 ton). Selanjutnya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 7 kecamatan pesisir yang menghasilkan ikan sebesar 11.930, 28 ton (2011). Realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Utara mencapai 97,50 persen (1,12 triliun rupiah) dan realisasi terbesar berasal dari dana pembangunan mencapai 98,52 persen, pada tahun 2011. Nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, hingga mencapai 11,04 triliun rupiah pada tahun 2009, yang terus mengalami kenaikan, sebesar 11,22 tahun 2010 dan mencapai 11,84 triliun rupiah pada tahun 2011 (Aceh Utara dalam angka, 2012).

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Potensi Kelapa Sawit di Aceh

Adapun Kabupaten atau kota yang memiliki potensi kelapa sawit di Provinsi Aceh adalah seperti ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Daerah Potensi Kelapa Sawit di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Lahan (Hektar)	Produksi (ton)		Kesimpulan	Rangking
			Perkebunan Besar	Perkebun Rakyat		
1	Aceh Barat	4.978	75.435	13.518	Berpotensi	6
2.	Aceh Barat Daya	2.873	-	574	Tidak Berpotensi	0
3.	Aceh Besar	1.200	-	23	Tidak Berpotensi	0
4.	Aceh Jaya	6.519	-	19.803	Berpotensi	8
5.	Aceh Selatan	5.848	2.538	8.200	Berpotensi	9
6.	Aceh Singkil	19.318	72.812	152.754	Sangat Berpotensi	1
7.	Aceh Tamiang	19.611	90.732	131.692	Sangat Berpotensi	2
8.	Aceh Tenggara	1.921	-	6.340	Tidak Berpotensi	0
9.	Aceh Timur	16.573	136.651	30.491	Sangat Berpotensi	4
10.	Aceh Utara	16.089	20.977	158.619	Sangat Berpotensi	3
11	Bener Meriah	52	-	293	Tidak Berpotensi	0
12	Bireuen	4.372	1.539	36.328	Berpotensi	7
13.	Nagan Raya	27.434	64.074	43.983	Sangat Berpotensi	5
14.	Aceh Pidie	55	-	2	Tidak Berpotensi	0
15.	Aceh Pidie Jaya	56	-	2	Tidak Berpotensi	0
16.	Simeulue	1.688	-	1	Tidak Berpotensi	0
17.	Kota Langsa	375	-	1.400	Tidak Berpotensi	0
18	Kota Lhokseumawe	207	-	688	Tidak Berpotensi	0
19	Kota Sabulussalam	-	-	-	Tidak Berpotensi	0
	JUMLAH	129.169	464.758	605.399		

Sumber: Hasil Survei Lapangan (2015)

Berdasarkan Tabel 5.1 hasil analisis dan perangkingan daerah berpotensi sawit di provinsi Aceh dapat diurutkan berdasarkan rangking tertinggi sebagai berikut :

- 1) Daerah yang sangat berpotensi komoditi sawit adalah :
 - a. Aceh Singkil (Rangking 1)
 - b. Aceh Taming (Rangking 2)

- c. Aceh Utara (Rangking 3)
 - d. Aceh Timur (Rangking 4)
 - e. Nagan Raya (Rangking 5)
- 2) Daerah yang berpotensi komoditi sawit adalah :
- f. Aceh Barat (Rangking 6)
 - g. Bireun (Rangking 7)
 - h. Aceh Jaya (Rangking 8)
 - i. Aceh Selatan (Rangking 9)
- 3) Daerah yang tidak berpotensi komoditi sawit adalah:
- j. Aceh Barat Daya
 - k. Aceh Besar
 - l. Aceh Tenggara
 - m. Bener Meriah
 - n. Pidie Jaya
 - o. Kabupaten Pidie
 - p. Simeulue
 - q. Kota Langsa
 - r. Kota Lhokseumawe
 - s. Kota Subulussalam

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Utara menempati posisi atau rangking ke-3 daerah yang sangat berpotensi kelapa sawit setelah Kabupaten Aceh Tamieng dan Kabupaten Aceh Singkil. Sebagai daerah yang sangat berpotensi kelapa sawit maka sangat wajar di Kabupaten Aceh Utara untuk tersedianya perusahaan atau industri olahan kelapa sawit.

4.2 Integrasi dan Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan

Berdasarkan roadmap penelitian yang berkaitan dengan kebijakan penguatan kelembagaan pertanian kepala sawit di Kabupaten Aceh Utara dan hasil penelitian yang ditemukan bahwa kelapa sawit dengan nama lain dikenal dengan *Elaeis Guineensis Jacq* memiliki posisi yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, akan tetapi yang ada saat ini hanya dalam bentuk CPO (*Crude Palm Oil*) saja, padahal kelapa sawit memiliki produk utama lain yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara yaitu PKO (*Palm Kernel Oil*) yang merupakan inti dari pada minyak sawit, namun PKO ini belum dikembangkan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih maksimal pemanfaatan produk kepala sawit baik CPO maupun PKO di Kabupaten Aceh Utara sangat diperlukan perencanaan daerah yang komprehensif dan ditetapkan di dalam RPJM atau RPJP daerah hal ini menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara. Dengan dimasukkannya program pemanfaatan produk kepala sawit baik industri hulu maupun hilir, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola pemanfaatan hasil sawit harus sesuai dengan program pengelolaan kelapa sawit secara berkesinambungan seperti yang terdapat dalam program RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

RSPO ini merupakan proses pengelolaan kebun dan produk kepala sawit untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan guna memproduksi barang dan jasa secara terus menerus dengan tidak mengurangi nilai inherent dan produktivitas masa depannya serta tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan biologi, fisik dan sosial.

4.2.1. Optimalisasi Peran Pemerintah

Melihat kepada kondisi tersebut maka Kabupaten Aceh Utara harus melakukan beberapa program penting supaya dapat memantabkan perkebunan kepala sawit sebagai komoditi unggulan daerah, adapun program tersebut adalah :

1. Memperkuat kelembagaan kepala sawit kabupaten Aceh Utara dengan membuat kebijakan atau qanun Kabupaten Aceh Utara yang berpihak kepada petani kepala sawit, di samping itu membuat qanun yang berkaitan dengan pengembangan produksi PKO secara berkesinambungan bekerjasama atau melibatkan berbagai Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Penerapan Teknologi terbaru dan SKPD terkait, misalnya Dinas Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan dan Perkebunan.
2. Kebijakan (policy) merupakan landasan hukum hasil produk legislative dan eksekutif daerah, dalam hal ini Kabupaten Aceh Utara perlu menetapkan dalam peraturan daerah (Qanun Daerah) yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan perkebunan di Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya qanun daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit akan lebih maksimal dilakukan, terutama PKO sebagai produk unggulan Kabupaten Aceh Utara di bidang perkebunan, khususnya kelapa sawit.
3. Memperkuat kolompok tani ditingkat pedesaan, karena kelompok tani memiliki beberapa keuntungan yaitu :

- a. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani
 - b. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru.
 - c. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani.
 - d. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya.
4. Memperkuat organisasi pengusaha yang berkaitan dengan agribisnis kelapa sawit meliputi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Assosiasi pengusaha Oleokimia Indonesia (APOLIN) dan Federasi Assosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI) dan working group lainnya.
5. Kabupaten Aceh Utara selalu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, karena perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Penelitian memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Perguruan Tinggi memiliki tiga peran yang menjadi kekuatannya yaitu : *Pertama*, Perguruan Tinggi harus dapat menggali potensi daerah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan yang cocok untuk di kembangkan di Kabupaten Aceh Utara. *Kedua*, mengetahui kondisi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang sesuai dengan social budayanya termasuk ketersediaan prasara dan sarana. *Ketiga*, merupakan perumusan rekomendasi dan perbaduan dimensi pertama dan kedua di atas kepada kelompok mitra agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga independen, Perguruan Tinggi merupakan lembaga pemantau agribisnis yang ada di daerah.

Skala prioritas yang perlu dilakukan adalah pembuatan qanun atau kebijakan public yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan perkebunan kelapa sawit di Kabupten Aceh Utara. Qanun yang merupakan landasan hokum untuk mengolah PKO disamping CPO, karena PKO sampai saat ini belum dimasukkan dalam produk unggulan dan rategis dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Litbang serta forum tani sangat diperlukan dalam proses pengembangan industry Pengolahan kelapa sawit di daerah ini.

4.3. Penguatan Usaha Agribisnis Kelompok Tani

Kegiatan ini tentunya tidak berhenti di pedesaan saja, tetapi berlanjut sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten bahkan provinsi dan nasional. Embrio pengembangan skala usaha agribisnis yang telah tampak di berbagai daerah sebagai usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang terintegrasi diseluruh daerah.

Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan penguatan Usaha Agribisnis Kelompok Tani harus mengikuti strategi-strategi sebagai berikut :

4.3.1. Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Kelembagaan Petani

a. Pemberdayaan Petani.

Pemberdayaan Petani yang diterapkan adalah perubahan pola pikir, wawasan dan perilaku petani. Tumbuhnya rasa percaya diri yang tinggi, kebersamaan, semangat gotong royong dan kesadaran akan potensi individu dan masyarakat tani untuk membangun masa depannya yang lebih baik. Walaupun proses perubahan pola pikir dan perubahan perilaku memerlukan waktu yang relative lama. Namun langkah awal untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat tani untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan berusaha tani secara lebih baik melalui penerapan teknologi dalam usaha taninya. Pemberdayaan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kelompok tani melalui : a). Peningkatan Produktivitas usaha tani dengan menerapkan teknologi, 2) peningkatan indeks tanam, 3) peningkatan nilai tambah, 4) pengembangan dan inovasi teknologi dengan difasilitasi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

4.3.2. Peningkatan Peran Organisasi Petani

Kesempatan dan bimbingan perlu diberikan kepada kelompok tani, agar wadah tani tersebut mampu melaksanakan usaha secara bersama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat tani. Aktivitas-aktivitas ini dimaksud adalah untuk :

- a) Meningkatkan fungsi usaha pertanian
- b) Membentuk kegiatan usaha bersama dalam mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
- c) Mengembangkan kelompok tani menjadi usaha yang berbadan hokum.

- d) Membina jejaring kerjasama antar kelompok tani untuk meningkatkan usaha agribisnis dan pemasaran hasilnya (*Scaling Up*)

4.3.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian merupakan strategi yang sangat penting dilakukan baik untuk industri hulu maupun industri hilir yang meliputi:

- a. Produksi kepala sawit akan meningkat secara signifikan.
- b. Kaum tani akan mendapatkan keuntungan yang meningkat.

4.4. Penguatan Koperasi Tani

Untuk mengembangkan usaha agribisnis baik skala besar maupun kecil sangat dibutuhkan adanya koperasi, tanpa koperasi sulit bagi agribisnis kecil berkembang, karena koperasi menjadi penghubung antara perusahaan besar. Koperasi merupakan wadah yang sangat penting dalam pembedayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi sebagai penyalur sarana produksi dan alat/mesin perkebunan kepada anggotanya (petani). Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, peluang pasar, perkembangan harga dan mendukung daya beli produk-produk pertanian khususnya kelapa sawit. Strategi yang perlu ditetapkan oleh kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Koperasi sebagai wadah investasi kepada para petani berupa penyedia transportasi, penyedia mesin pengolah produk pertanian (Agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota koperasi (Petani). Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan koperasi. Sehingga pada akhirnya program agroestate perkebunan di Kabupaten Aceh Utara dapat diwujudkan.
2. Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha seperti bekerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha perkebunan kepala sawit rakyat, sehingga petani mampu mengembangkan produk unggulan perkebunan kepala sawit seperti PKO selain CPO sudah pasti mendapatkan peluang pasar yang menjanjikan. Dengan adanya produk unggulan maka dengan mudah pengembalian kredit mereka dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

3. Koperasi sebagai unit usaha dibidang agribisnis, secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang luas dan komprehensif serta dapat dikelompokkan dalam lima komponen utama yang meliputi :
 - a. Bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin pertanian,
 - b. Bidang produksi komoditas perkebunan kelapa sawit seperti CPO, PKO dan produksi industry hilir dan hulu,
 - c. Bidang industry pengolahan hasil pertanian (Agroindustri)
 - d. Bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian, dan
 - e. Bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi atau unit simpan pinjam.

Kegiatan unit usaha yang dilakukan oleh koperasi berbasis perkebunan akan menumbuhkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan petani perkebunan kelapa sawit, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga terjadinyapeningkatan pendapatan petani perkebunan kelapa sawit dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani secara signifikan.

Dalam menumbuhkan koperasi perkebunan kelapa sawit tersebut harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga berdampak positif kepada para petani sawit yang ada di Kabupatn Aceh Utara.setiap pihak yang bermitra dengan koperasi tersebut tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan belaka, seharusnya terjalin kinerja yang memuaskan, karena kehenak bisnis yang dibarengi oleh rasa tanggungjawab social yang kuat. Keberadaan koperasi merupakan sebuah piranti dalam pembedayaan ekonomi masyarakat petani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara.

4.5 Optimalisasi Peran Swasta

Peran swasta dalam peningkatan pemberdayaan perkebunan kepala sawit mutlak diperlukan, karena peran swasta, peran pemerintah dan peran perguruan tinggi sangat menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara. Perusahaan swasta menjadi pendukung petani dalam menyediakan berbagai kebutuhan petani misalnya penyediaan pupuk, bibit dan obat-obatan lainnya yang bekerja sama dengan koperasi petani yang ada di perkebunan kepala ssawit.

4.5.1 Optimalisasi Peran Akademisi

Akademisi merupakan unsur terpenting dalam dunia usaha, karena setiap perguruan tinggi memiliki peran pengabdian kepada masyarakat, mereka berkumpul di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Akademisi juga berperan sebagai agen pembangunan dalam sebuah negara atau Daerah (*agent of development*), keterlibatan mereka dalam merumuskan kebijakan publik atau qanun untuk dipergunakan sebagai landasan hukum dalam mendesain industri baru di kabupaten Aceh Utara.

Ketika sebuah industri olahan kelapa sawit memiliki dasar hukum yang legitimit, maka secara otomatis investor luar mau menanam modalnya di kabupaten Aceh Utara. Apabila legalitasnya belum ada, investor asing tidak mungkin mau menanam modalnya di kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian peran akademisi sangat diperlukan terutama dalam menganalisis berbagai potensi dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang ada,

4.6 Desain Industri Olahan Kelapa Sawit

Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah potensi kelapa sawit, dimana luas areal perkebunan, sebesar 29.187 hektar dengan produksi 399.193 ton. Pengembangan luas lahan kelapa sawit dapat meningkatkan produksi yang berupa tandan buah segar (TBS), hal ini telah memenuhi syarat untuk menumbuhkan industri pengolahan sawit, dimana pengolahan sawit Aceh Utara masih dalam bentuk minyak sawit mentah, berupa CPO (*crude palm Oil*), itupun pabriknya hanya baru 1 unit, terdapat di Aceh Utara (pabrik CPO di Cot Girek) dengan kapasitas produksi 40 ton, sedangkan hasil produksi sawit Aceh Utara yang selebihnya harus dibawa keluar Aceh Utara, yaitu ke kabupaten Bireuen dan kabupaten Aceh Timur.

Kabupaten Aceh Utara dengan potensi sawit yang besar, pemanfaatannya masih dalam bentuk industri pengolahan minyak sawit mentah (CPO), padahal produk kelapa sawit dapat diolah menjadi industri pengolahan yang bervariasi yang dapat memberikan efek yang meliputi : (a) pertumbuhan subsektor ekonomi, (b) pengembangan wilayah industry, (c) proses alih teknologi, (d) perluasan lapangan kerja, (e) perolehan devisa dan (f) peningkatan penerimaan pajak (permenindustri nomor 13/M-IND/PER/1/2010).

Pengembangan industri hilir kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat memperkuat keterikatan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri hulunya yang berupa TBS, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah (*value added*) sepanjang rantai nilai yang

selaras dengan produktivitas produksi industri hulu. Adapun tujuan (indicator) pencapaian pengembangan industri inti (hilir) kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara, adalah diversifikasi produk kelapa sawit, yaitu: (1) untuk meningkatkan investasi baru dan perluasan usaha industri berbasis minyak sawit, (2) terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari produk kelapa sawit, (3) meningkatkan kapasitas industri hilir (inti) kelapa sawit dan bahkan (4) untuk penguasaan pasar global hasil industri kelapa sawit.

Beberapa langkah dilakukan di kabupaten Aceh Utara dalam pengembangan industri turunan sawit, yaitu;

1. menyusun strategi pengembangan dan rencana aksi yang diarahkan pada industri hilir kelapa sawit. Pengembangan industri olahan kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara masih pada industri yang berdasarkan bahan baku dari produk CPO, juga direncanakan untuk menumbuhkan pabrik industri PKO yang dapat dikembangkan untuk melahirkan industri-industri turunan, baik untuk industri hilir maupun menumbuhkan industri yang terkait dengan industri hilir.
2. Kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga penelitian perguruan tinggi. Penumbuhan industri hilir, dengan industri pendukung dan industri terkait dari industri olahan CPO dan direncanakan penumbuhan untuk industri PKO dan industri olahannya, berupa industri turunan pendukung dan terkait, dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dengan membuat kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah serta jangka panjang untuk pengembangan industri olahan kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan value added kelapa sawit petani yang dapat meningkatkan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan dan penumbuhan lowongan pekerjaan. Dunia usaha yang berupa investor sebagai bapak angkat yang akan menginvestasi (memperluas usaha) dalam menumbuhkan industri sawit yang beraneka ragam, dengan, sehingga dari modal yang diinvestasi dapat meningkatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat berpartisipasi dalam mendorong percepatan pembangunan di kabupaten Aceh Utara. Lembaga penelitian yang berspesialisasi pada pengembangan produk kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara untuk melahirkan rekomendasi tentang pengembangan industri sawit kepada pemerintah untuk diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan dan kepada dunia usaha untuk

- menumbuhkan industri yang menguntungkan dunia usaha dan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja,
3. melaksanakan rencana aksi pusat dan daerah kabupaten Aceh Utara secara terkoordinasi. Pengembangan industri yang berbasis dari olehan kelapa sawit (CPO) dan PKO sesuai dengan rencana jangka panjang tentang pengembangan industri CPO dan PKO nasional, yaitu usaha mengembangkan industri turunan untuk memenuhi kebutuhan domestic dan ekspor dengan memasukan rencana tersebut kedalam RPJM dan RPJP kabupaten Aceh Utara
 4. membentuk tim monitoring dan evaluasi pusat dan daerah untuk melaksanakan rencana aksi. Dengan memasukan rencana pengembangan industri olahan sawit ke dalam RPJM dan RPJP kabupaten Aceh Utara, maka tim monotereng nasional dan kabupaten Aceh Utara telah sinergi menjadikan produk olahan sawit CPO dan PKO, menjadi produk andalan perkebunan yang dapat mendatangkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menciptakan pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Utara.

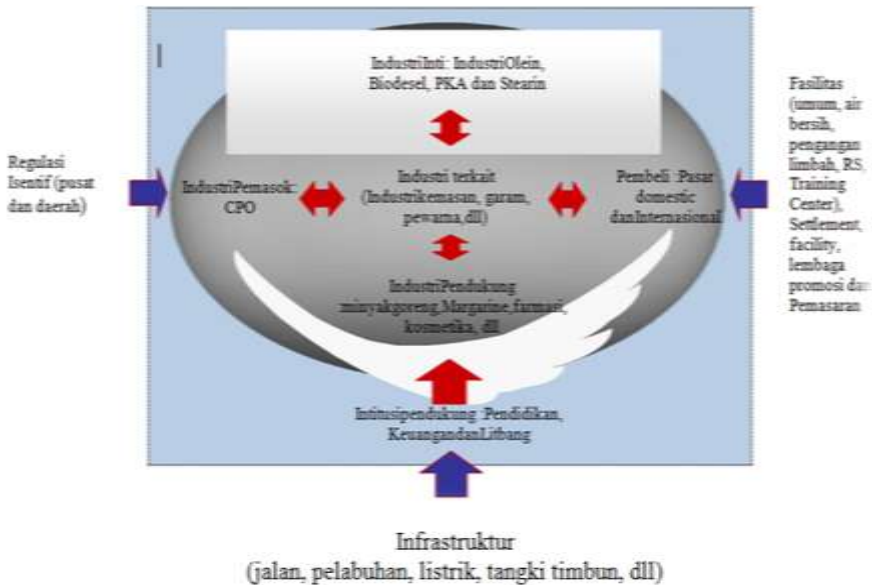
Pengelompokan industri olahan sawit di kabupaten Aceh Utara yang dapat dikembangkan adalah; dari industrihulu, produk CPO. Kemudian industriolahan dari CPO berupa industrihilir dalam katogori industri pangan dan non pangan yang berupa olein dan olekimia dasar, selanjutnya pengolahan industri turunan diantaranya katagori pangan, industriminyak goreng dan margarine. Indutri hilir yang dapat dikembangkan di kabupaten Aceh Utara adalah

Tabel 5.2. Pengembangan Industri Hilir di Kabupaten Aceh Utara dari industri Hulu CPO

Industri Inti	Industri Pendukung	Industri terkait
Industri olein	Minyak goreng dalam kemasan, minyak salad, shortening, metil ester dan industri pakan ternak	Industri kemasan, industri pewarna, industri garam, industri asam fosfat dan industri potassium sorbet
PKA	Industri cocoa butter substitute, dan industri farmasi	Industri kemasan, industri mesin dan peralatan
Industri Biodiesel	Jasa transportasi, pembangkit listrik, dan industri gliserol	Industri methanol, industri mesin dan peralatan, dan industrimetilat
Stearin	Industri Margarine, Industri Kosmetika,dan industri Vegetabel Ghee	Industri bahan pemucat, industri garam, industri kemasan dan industri bahan pewarna
<p>Sasaran jangka panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> memperluas jenis produk hilir kelapa sawit penguasaan pasar domestik dan internasional pemantapan industri berwawasan lingkungan 		
<p>Sektor : diversifikasi produk industri hilir kelapa sawit untuk industri dalam negeri, meningkatnya ekspor sawit mentah dan peningkatan promosi dan kampanye minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.</p> <p>Teknologi: Pengembangan industri industri hilir kelapa sawit</p> <p>Insentif : Insentif fiskal dan nonfiskal daripada kelapa sawit</p>		

Sumber : Desain Penelitian, 2015

Pengembangan industri hilir kelapa sawit (CPO) dapat menciptakan efek multiplayer ekonomi, hal ini diakibatkan oleh adanya keterikatan industri pengolahan sawit di kabupaten Aceh Utara dengan industri pemasuk (industri hilir), adapun keterikatan tersebut adalah:



Gambar 5.1 Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO) Kabupaten Aceh Utara

Pengembangan industri olahan kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara dari minyak buah kelapa sawit (CPO) dapat menumbuhkan berbagai industri turunan, mulai dari industri inti (industri hilir), industri pendukung dan keterkaitan industri yang berhubungan dengan industri tersebut. Industri inti dari produk bahan baku CPO yang akan dikembangkan di kabupaten Aceh Utara adalah: industri Olein, yang akan dapat dikembangkan menjadi beberapa industri turunannya (sebagai industri pendukung), yaitu industri minyak makan, industri minyak salad, industri shortening, industri metil ester dan industri pakan ternak. Pengembangan industri olein disamping melahirkan industri pendukung, juga akan dapat dikembangkan industri terkait, yang berupa industri kemasan, industri pewarna, industri garam, industri asam fosfat, dan industri potassium forbet.

Pengembangan industri yang berbasis bahan baku CPO di kabupaten Aceh Utara juga akan melahirkan industri inti (hilir) berupa industri PKA dengan menumbuhkan industri pendukung, yang berupa industri cocoa butter substitute, dan industri farmasi, sedangkan industri terkait dengan lahirnya industri hilir PKA dan industri pendukungnya akan dapat menumbuhkan industri terkait, yaitu : Industri kemasan, industri mesin dan peralatan.

Selanjutnya, di kabupaten Aceh Utara dengan bahan baku CPO dapat dikembangkan industri hilir (inti), yang berupa industri biodiesel yang akan menumbuhkan industri turunan yang berupa industri pendukung industri Jasa transportasi, pembangkit listrik, dan industri gliserol, dan dari industri inti dan industri pendukung akan memerlukan industri pendukung, yaitu industri Industri methanol, industri mesin dan peralatan, serta industri metilat.

Pengembangan industri yang berbasis CPO di kabupaten Aceh Utara dapat menghasilkan industri hilir (inti) yang berupa industri Steari, sehingga dapat menbuhkan industry Margarine, industri Kosmetik, industri Vegetabel Ghee dan Industri Sabun. Pengembangan industry pendukung dari fabric industry Stearin akan memerlukan terjadi pertumbuhan industri pendukung, yaitu industri bahan pemucat, industri garam, industri kemasan dan industri bahan pewarna.

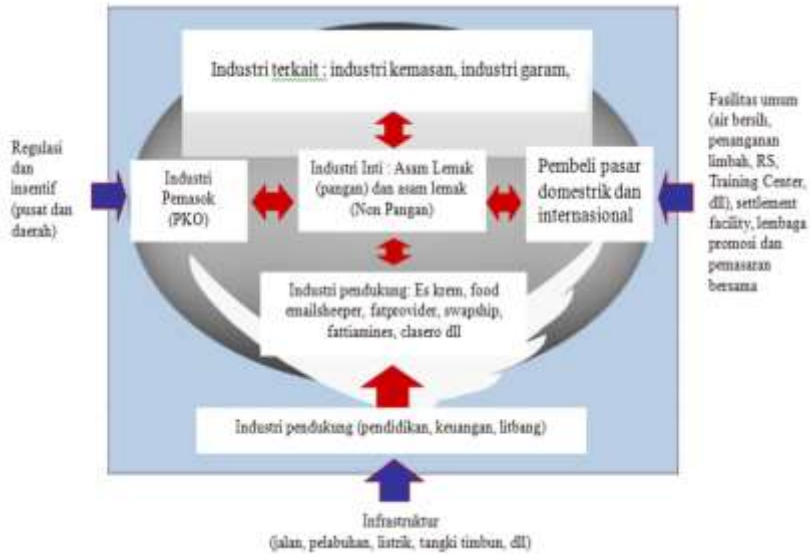
Produk dari inti minyak sawit (PKO) di kabupaten Aceh Utara masih belum dikembangkan, namun dalam perancangan penelitian ini, disarankan kepada pemangku kepentingan, yaitu para investor yang berminat untuk mendirikan pabrik PKO di kabupaten Aceh Utara, mengingat sumber bahan baku dari tandan buah sawit (TBS) sangat besar di kabupaten Aceh Utara (399.139 ton). Industri turunan dari PKO juga untuk dikembangkan di kabupaten aceh Utara, berupa produk industri pangan dan produk industri non pangan,, sehingga dapat menciptakan efek pengganda ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Adapun rencana pengembangan industri hilir di kabupaten Aceh Utara dari pengembangan produk minyak inti sawit PKO, yang berupa produk industri pangan dan non pangan, adalah:

Tabel 5.3 Rencana Pengembangan Industri Hilir di Kabupaten Aceh Utara dari industri Hulu PKO

Industri Inti	Industri Pendukung	Industri terkait
Asam Lemak (Pangan)	Industri es krim, food emulsifier, fat provider dan industri vanaspati	Industri kemasan, industri garam dan industri pewarna
Asam Lemak (non pangan)	Industri soap chip, Industri fatty amines, industri ester asam lemak, industri gilsero, industri food emulsify, industri fatty alkohol dan industri fatty acid	Industri kemasan, industri mesin dan peralatan
<p>Sasaran jangka panjang : (a) memperluas jenis produk hilir kelapa sawit (b) penguasaan pasar domestik dan internasional (c) pemantapan industri berwawasan lingkungan</p>		
<p>Sektor : diversifikasi produk industri hilir kelapa sawit untuk industri dalam negeri, meningkatnya ekspor sawit mentah dan peningkatan promosi dan kampanye minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.</p> <p>Teknologi : Pengembangan industri industri hilir kelapa sawit</p> <p>Insentif : Insentif fiscal dan nonfiscal daripada kelapa sawit</p>		

Pengembangan industri hilir kelapa sawit (PKO) dapat menciptakan efek multiplayer ekonomi, hal ini diakibatkan oleh adanya keterikatan industri pengolahan sawit di kabupaten, yang dapat dijelaskan pada gambar 2 berikut:



Gambar 5.2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKO) Kabupaten Aceh Utara

Pengembangan industri olahan kelapa sawit di kabupaten Aceh Utara dari minyak inti sawit (PKO) dengan menumbuhkan industri turunan, mulai dari industri inti (industri hilir), industri pendukung dan keterkaitan industri dan mempunyai keterkaitan dengan industri tersebut. Industri inti dari produk bahan baku PKO di kabupaten Aceh Utara adalah: industri asam lemak (pangan), yang akan dapat dikembangkan menjadi industri pendukung, yaitu industri Industri es krim, food emulsifier, fat provider dan industri vanaspat.. Pengembangan industri asam lemak (pangan) yang melahirkan industri pendukung, juga dapat dikembangkan industri terkait, yang berupa Industri kemasan, industri garam dan industri pewarna.

Pengembangan industri yang berbasis PKO di kabupaten Aceh Utara dapat menghasilkan industri hilir (inti) yang berupa industri asam lemak (non pangan), sehingga dapat menumbuhkan industri pendukung, yang berupa industri Industri soap chip, Industri fatty amines, industri ester asam lemak, industri gilsero, industri food emulsify, industri fatty alcohol dan industri fatty acid dan dari industri asam lemak non pangan (PKO) di kabupaten Aceh Utara akan melahirkan industri terkait, yang berupa industri : industri kemasan dan industri mesin dan peralatan. *

This page is intentionally left blank

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solihin 2004, *Analisis Kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anonymous. 2009. *Karet*.
<http://ditjenbun.deptan.go.id/images/stories/testing/karet.pdf> Tanggal
Akses : 12 Agustus 2013.
- Antjok, Jamaluddin 1995, *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Adytia Media, Yogyakarta.
- Arifin, Bustanul. 2008. *Fenomena Penurunan Harga CPO*. Seputar Indonesia : 5 (kolom 2-6)
- Asnawi, 2012, *Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Pasai Vol 6 Tahun 2012
- Asnawi, Yusra, Aiyub dan Amru Usman. 2013. *Pengembangan Coloring Economic Models Suatu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit sebagai penggerak Ekonomi dalam upaya mengurangi Kesmiskinan di Provinsi Aceh*. Laporan Penelitian MP3EI
- Bahrin, D., Nukman, dan Y. Dariansyah. 2008. Biomassa: Bahan Bakar Bersih Untuk Industri Karet Di Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Nasional AvoER ke-3 26-27 Oktober 2011. Palembang.
- Boediono, 1985 *Pengantar Teori Makroekonomi*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chalid, F. 1999. *Pemanfaatan Sabun Asam Lemak Minyak Kelapa Sawit Sebagai Bahan Bantu Olah Karet*. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Departemen Perindustrian. 2007. *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*. Melalui: <http://www.deperindag.go.id>. diakses tanggal: 2 Oktober 2013..
- DEPTAN BPPP. 2007. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Karet*. Edisi 2, Jakarta
- Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia. 2008. *Basis Data Statistik Indonesia*. Departemen pertanian Indonesia, Jakarta.

- Dunn, William N (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajahmana Press.
- Faried, Wijaya, 1990 *Kemiskinan Struktural di Indonesia: Menembus Lapisan Bawah*, Dalam Jurnal Studi Indonesia, Vol 7-Januari 1997.
- Friedman, John (1979), *Urban Poverty In Latin America, Some Theoretical Consideration Development Dialogue*, Vol 1 Upsala Dag Hommerskjold Foundation
- Hadisoebroto, K. 2005. Prospek Pemanfaatan Oleokimia Berbasis Minyak Sawit Untuk Industri Kosmetika, Personal Care, Cleaning & Washing Products. Seminar Nasional Pemanfaatan Oleokimia Berbasis Minyak Sawit pada Berbagai Industri. Tanggal 24 November 2005. Bogor.
- Hal Anthony dan Jame Midgley (2004), *Social Policy for Developmen*, Sage Publication Ltd, London.
- Hanafie, Rita (2010), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, ANDI Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansyah (1997), *Kemiskinan Struktural di Indonesia: Menembus Lapisan Bawah*, Dalam Jurnal Studi Indonesia. Vol 7 Januari 1997.
- Hasrul Harahap, 2011, Bersama Melawan Kemiskinan, *Harian Waspada*, Rabu 19 Januari 2011.
- Hettne, Bjorn (1982), *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- <http://kaefff3.blogspot.com/2011/03/kerjasama-pembangunan-pabrik-kelapa.html>
- <http://kaefff3.blogspot.com/2012/08/konsultan-kontraktor-pabrik-kelapa-sawit.html>
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ia=64&ic=2>
- Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Laporan Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian. Jakarta.
- Kementrian Pertanian (2014), *Kebijakan Pembangunan Pertanian, 2014-2019*, disampaikan pada workshop aplikasi e-proposal 2015 dan e-money 2014 wilayah Barat, Bandung 5-7 Maret 2014.
- Khudori. 24 November 2008. *Titik Balik Industri Sawit*. Kompas : 6 (kolom 3-7)

- Lincolin Arsyad (1999) *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi
- Mehmet, Ozay (1995), *Westernizing The Third World*, Routledge, London and New York.
- Michael P Todaro (1993) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan Burhanuddin Abdullah, Edisi ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mukti. 2009. Analisis Kelayakan Investasi Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam). Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho. Riant (2009), *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pahan, I. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Jakarta : penebar Swadaya.
- Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 13/M-IND/PER/1/2010 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit
- Ramli (2011), *Masalah Kemiskinan Indonesia*, Harian Waspada, Rabu 19 Januari 2011
- Sadono Sukirno (1994), *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Starhn, Rudolf H, (1999), *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negera Berkembang*, CIDES-Jakarta
- Sumarjan, Selo (1977), *Kemiskinan Suatu Pandang Sosiologi*, Jurnal Sosiologi Indonesia, No 2-1977, Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Sunarko. 2007. *Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit*. Jakarta : Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Sunarko. 2007. *Petunjuk Praktis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit*. PT Agromedia Pustaka. Jakarta
- Supandi (2013) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Koperasi dalam Pengembangan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau);
- Susy Edwina, Evi Maharani dan Helmina Girsang (2003), *Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Dr. Asnawi, S.E.,M.Si/Dr. Rasyidin, S.Sos, M.A/Aiyub, S.E.,M.Ec/Amru Usman, S.E., M.Sc.*

Tampan Kota Pekanbaru, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan, Vol 2 No. 1 Juli 2003.

- Thamrin (1995), *Agenda Mempersempit Ketimpangan dan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Tim Bina Karya Tani. 2009. *Tanaman Kelapa Sawit*. Yrama Widya
- Tim Penulis PS. 2005. *Karet ; Strategi Pemasaran Budidaya dan Pengolahannya*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tjokroaminoto, Moeljarto (1996), *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tri Noor Aziza (2008), *Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian*, PKP2A III LAN Samarinda.
- Triwijoso, Sri Utami. 1995. Pengetahuan Umum Tentang Karet Hevea. Dalam Kumpulan Makalah : In House Training, Pengolahan Lateks Pekat dan Karet Mentah. No : 1. Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor, Bogor.
- Yunita Setyawati (2000), *Analisis Kausalitas Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (Kasus Perekonomian)*, Universitas Islam Yogyakarta, Skripsi

RIWAYAT HIDUP

A. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Asnawi, SE.,M.Si
 NIP : 196402082001121001
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata (Gol. III/c)
 Tempat/Tgl. Lahir : Teupin Gajah / 8 Pebruari 1964
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Bidang Keahlian : Ekonomi Publik dan Agricultural
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas
 Malikussaleh

 Status : Kawin
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kontak Person : 081269188965
 Email : asnawiabd@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Nama Sekolah	Tempat	Tanda Lulus/Tahun
1.	S-1	Universitas Syiah Kuala Darussalam	Banda Aceh	Ijazah/1991
2.	S-2	Universitas Syiah Kuala Darussalam	Banda Aceh	Ijazah/1999
3.	S-3	Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan	Kuala Lumpur, Malaysia	Ijazah/2008

C. Riwayat Pekerjaan

No.	Periode	Nama Instansi	Jabatan
1.	1990-Sekarang	Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh	Dosen
2.	2002-2003	Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh	Pembantu Dekan I
3.	2008-2009	Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Ekonomi, (TAPPE), Kabupaten Aceh Utara	Anggota, Bidang Permodalan
4.	2006 – Sekarang	Research & Development, Lhokseumawe	Direktur Utama
4.	2009 – 2012	Jurnal MANTEKH ASM-Tanah Rencong, Lhokseumawe	Ketua Dewan Redaksi
5.	2012- Sekarang	LPPM STIE Bumi Persada, Lhokseumawe	Ketua
6.	2012-Sekarang	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi STIE Bumi Persada Lhokseumawe	Ketua Redaksi
7.	2012-Sekarang	Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Aceh Utara	Bidang Perenc dan Ekonomi

D. Penelitian dan Seminar

No.	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh	1999	Peneliti
2.	Analisis Ekonomi terhadap Penternakan Udang di Aceh	2005	Peneliti
3.	Analisis Ekonomi Pemasaran Udang dalam Prospek Pembangunan Perikanan di Aceh	2006	Pemateri/International Kuala Lumpur
4.	Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara	2007	Ketua Peneliti (Penelitian Dosen Muda, DIKTI)

5.	An Econometric Analysis of The Industrial Farming of Shrimp in Aceh and Sumatera Utara	2008	Peneliti
6.	Analisis Eksport Udang di Indonesia: Suatu Pendekatan ECM	2008	Peneliti
7.	Analisis Ekonomi Pengeluaran Udang dalam Prospek Pembangunan Perikanan di Aceh	2008	Pemateri/International Lhokseumawe, Aceh
8.	Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah, STAIM Malikussaleh, Lhokseumawe	2008	Pemateri
9.	Pelatihan Pengawasan dan Monitoring Pembangunan (MONEV), BAPPEDA, Kabupaten Aceh Utara	2008	Pemateri
10.	Kewirausahaan bagi Usaha Kecil Menengah, pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Aceh Utara	2009	Penyuluh
11.	Pelatihan Kewirausahaan dan Teknologi Tepat Guna, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Lhokseumawe	2009	Instruktur
12.	Penyuluhan Usaha Kecil Menengah, pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Utara	2009	Penyuluh
13.	Belanja Publik, Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara	2010	Peneliti
14.	Pengeluaran Pembangunan, Penanaman Modal, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	2010	Peneliti
15.	Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	2011-2012	Ketua Peneliti (Hibah Bersaing, DIKTI)
16.	Pengembangan Coloring	2013	Ketua Peneliti (Hibah

	Economic Models: Suatu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh		MP3Ei, DIKTI)
17	Desentralisasi Pengelolaan Sektor Pertanian dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh	2013	Peneliti
18	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan dan Loyalitas Pasien Rumah Sakit Kota Langsa	2013	Ketua Peneliti
19	Penerapan Coloring Economic Model Suatu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit Sebagai Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh	2014	Peneliti

E. Artikel Ilmiah

No.	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Sistem Ekonomi Islam sebagai suatu Alternatif	2004	Jurnal E-Mabis Fekon, Unimal
2.	Analisis Ekonomi ke atas Penternakan Udang di Aceh	2004	Prosiding, Seminar PPS-UKM, Malaysia
3.	Ekonomi Kerakyatan, Suatu Alternatif	2008	Serambi Indonesia
4.	Inflasi, Suatu Dilema Perekonomian	2008	Tabloid Modus Aceh
5.	Empat Pilar Pembangunan Ekonomi Rakyat (Suatu Tawaran untuk Pemerintah Aceh)	2008	Aceh Independen

6.	Kebijakan sisi Penawaran suatu Alternatif mengatasi kenaikan BBM	2008	Harian Aceh
7.	Bagaimana KPK	2008	Harian Aceh
8.	Pembangunan Ekonomi Rakyat Melalui Industri Kecil	2008	Aceh Independent
9.	Preman, Pengangguran dan Lapangan Kerja	2008	AcehIndependent
10.	Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara	2008	Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial PASAI, Vol 2, No. 1
11.	Kereta Api Aceh	2009	Tabloid Modus Aceh
12.	BHP dan Kemandirian Perguruan Tinggi	2009	AcehIndependent
13.	Faktor-Faktor Penyebab Inflasi di Indonesia	2009	Jurnal: MANTEKH, No. 1 Juli 2009
14.	Analisis Ekonometrika Pemasaran Udag di Aceh dan Sumatera Utara	2010	Jurnal: MANTEKH, No. 2 Juli 2010
15.	Belanja Publik, Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara	2010	Jurnal Poelitik ISSN: 1978-063X, Vol 6/No.12, Tahun 2010
16	Desentralisasi Pengelolaan Sektor Pertanian dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh	2013	Proseding, Semnas Membangun ekonomi Dari Daerah

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, September 2015
Pengusul,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Asnawi'.

Dr. Asnawi, SE.,M.Si

*

CURIKULUM VITE PENULIS

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, M.A, Lahir di Gandapura, 06 Mei 1961, Jenis Kelamin laki-laki, menikah dengan Hj. Nur Asma, HS, Lektor Kepala IV/c, Pangkat Pembina Utama Muda /IV/c dengan NIP 196105062001121001 beralamat Jln.Medan-Banda Aceh KM 169.5 Dusun 1 Laoskala, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Jalur pendidikan yang dilalui adalah: 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gandapura (tamat tahun 19740), 2. SMP Persiapan Negeri Cunda (Tamat tahun 1970), 3. SMAN 1 Lhokseumawe Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (tamat tahun 1980/1981), 4. Strata satu (S1) Universitas Malikussaleh, Jurusan Ilmu Administrasi Negara (tamat tahun 1997), 5 Strata dua (Master) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat tahun 2004), dan 6. Strata tiga (Doktor) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat Tahun 2012). Pengalaman Organisasi: 1. Anggota Pengurus Aceh Postgraduate Student Associaton Malaysia (2002-2003, 2. Pengurus Badan Kebijakan Mahasiswa Aceh Kuala Lumpur (2002-2004), 3. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslem Indonesia (ICMI) Kota Lhokseumawe (2006-2010). 4. Ketua Bidang Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cab, Kota Lhokseumawe (2005-sekarang), 5. Dewan Pakar Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe (2011-2015). Penelitian dan Karya Ilmiah yang dihasilkan adalah : **Pada tahun 1999**. Perubahan Perilaku Sosial dalam era Reformasi. 2. Pengaruh Hubungan Masyarakat dalam mendukung kebijakan pimpinan **Pada tahun 2002**, 1. Masyarakat Sipil dalam pandangan Islam. 2. Ideologi politik Negara-negara dunia ketiga. **Tahun 2003**, 1.5. Terorisme dalam pandangan Amerika Serikat. 4. Partisipasi politik masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam setelah penerapan Undang- undang Nomor 18 tahun 2001. **Tahun 2004**. 1. Perubahan perilaku *Masyarakat Aceh pasca diberlakukan darurat militer* 2. Partisipasi Politik Perempuan di NAD, studi Kota Lhokseumawe.3. Pembangunan dalam perspektif perempuan. **Tahun 2005**. 1. *Aceh Development Model in The Future*. **Tahun 2006**. 1. E-learning dalam peningkatan SDM di NAD. **Tahun 2007**. .Pemberdayaan Gender dalam pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam. **Tahun 2009**. 1. Swing Voter di Pemilu 2009 di Indonesia.**Tahun 2010**. 1. Pemberdayaan Politik Gender : Kasus Aceh sebelum dan setelah MoU Helsinki. 2. Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan.**Tahun 2011**. Sulthan Malikussaleh Dulu Kini dan Esok dalam perspektif Ekonomi Politik. 2. Konflik Politik di dunia ketiga. **Tahun 2012**. 1. Pengaruh

Komunikasi Politik terhadap Pemilihan Umum Pimpinan Daerah di Provinsi Aceh. 2. Pengaruh KBK terhadap kualitas lulusan Perguruan tinggi. **Tahun 2013.**1. Kecerdasan politik dan Partisipasi politik Warga Kota Lhokseumawe pada Pilkada tahun 2012, 2. *Nation and Character Buliding* sebagai Instrumen perekat Wawasan Kebangsaan Indonesia. **Buku,** 1. Politik Gender Aceh Studi tentang pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki. Tahun 2013. 2. Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan MoU Helsinki. Tahun 2015. 3. Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh, tahun 2015.

*

A. Identitas Diri Anggota Peneliti 1

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aiyub, SE. M.Ec L
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	Pembina
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197112062002121001
5	NIDN	0006127104
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Paloh Batee, 06 Desember 1971
7	Alamat Rumah	Paloh Batee Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	081360182072
10	Alamat Kantor	Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Lancang Garam Lhokseumawe
11	Nomor Telepon/Faks	0645-7014461/0645-40211
12	Alamat e-mail	aiyub_unimal@yahoo.com
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 126 orang; S-2= 20 Orang; S-3= - Orang 1. Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Ekonomi Mikro 2. Ekonomi Makro 3. Ekonomi Manajerial
14.	Mata Kuliah yg Diampu	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unimal	UKM Malaysia	-
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen SDM	-
Tahun Masuk-Lulus	1995-2000	2002-2004	-
Judul skripsi/Thesis/Disertasi	Peran Pengawasan Internal terhadap Kinerja PT. Bank Duta Cabang Lhokseumawe	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Di Indonesia	-
Nama Pembimbing	1. Prof. A. Hadi Arifin, M.Si 2. Abd. Jamal, S.E., M.Si	Prof. Dr. Ishak Jusuf	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2008	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara	Pemda Aceh Utara	25.000.000
2	2008	Analisis Potensi Pengembangan Bank Syariah Untuk Kepentingan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam di Nanggroe Aceh Darussalam	BRR	100.000.000
3	2009	Penjelasan Pola Volume Perdagangan Trade dengan Data Transaksi Order Saham di Bursa Efect Indonesia	Pemda	72.500.000
4	2010	Pengaruh Variabel Terpilih Terhadap Kinerja Geuchik Sebagai Pimpinan Gampong	Pemda Kota Lhokseumawe	30.000.000
5	2010	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Bank Konvensional dan Keinginan Menabung serta Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam	Pemda Nad	70.000.000
6	2010	Analisis Faktor-	Mandiri	15.0000.000

		Faktor yang mempengaruhi Pemilih dalam pengambilan keputusan pada Pemilihan Anggota DPRK Aceh Utara		
7	2012	Pengaruh Bandwagon Effect Pada Pemilukada Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara	Dikti	47.500.000,-
8	2013	Pengembangan Coloring Economic Model Suatu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit Sebagai Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh	Dikti	150.000.000,-
9	2013	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan dan Loyalitas Pasien Rumah Sakit Kota Langsa	Mandiri	15.000.000
10	2014	Penerapan Coloring Economic Model Suatu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit Sebagai Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh	Dikti	150.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp)
1	2009	Pemateri/Penyaji pada Acara workshop jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya	APBD NAD	5.000.000
2	2012	Konsultan Pasangan Calon Baktiar, S.T M.T dan T. Hasansyah dalam pemilukada Aceh Utara Tahun 2012	Mandiri	5.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara	Volume IV halama 385-400/ ISSN 1979-19755/Tahun 2008	Jurnal Pasai
2	Analisis Potensi Pengembangan Bank Syariah Untuk Kepentingan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ajaran Islam di Nanggroe Aceh Darussalam	Halaman 79/ISBN 979-1372-08-04/Tahun 2008	Proceeding
3	Penjelasan Pola Volume Perdagangan Trade dengan Data Transaksi Order Saham di Bursa Efect Indonesia	Volume 8/ISSN 979-14411-8831/Tahun 2009	Media Riset Akuntansi
4	Pengaruh Variabel Terpilih Terhadap Kinerja Geuchik Sebagai Pimpinan Gampong	Volume III/ISSN 1693-5241/Tahun	Jurnal Aplikasi Manajemen

		2010	
5	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Bank Konvensional dan Keinginan Menabung serta Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam	Halaman 177/ISSN 979-99786-6/Tahun 2010	Proceeding
6	Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara)	Halaman 1-25/ISSN 1979-1755 Volumen 6, Nomor 1, Mei 2012	Jurnal Pasai

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			
2	-			

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			
2	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Ditetapkan	Tahun	Tempat Penetapan	Respon Masyarakat
1	Tim Perumus Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006	2006	Propinsi Aceh	Positif
2				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Kreatif 1	Fakultas Ekonomi Unimal	2013
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Lhokseumawe, 14 April 2014
Pengusul.



Aiyub, S.E., M.Ec
NIP 197112062002121001

A. IDENTITAS DIRI

- 1. Nama Lengkap (dengan gelar) : Amru Usman, SE, M.Sc., Ak
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- 4. NIP/NIK/No. identitas lainnya : 197606132006041006
- 5. NIDN : 0013067607
- 6. Tempat dan Tanggal Lahir : Sigli, 13 Juni 1976
- 7. Alamat e-mail : amru_1376@yahoo.com
- 8. Nomor Telepon/ Nomor HP : 081362535952
- 9. Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Unimal
Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe
- 10. Nomor Telepon/Faks : -
- 11. Lulusan yang telah dihasilkan : S1= 15 Orang, S2= Orang,
S3= Orang
- 12. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Sistem Informasi
Manajemen
2. Sistem Informasi
Akuntansi
3. Kewirausahaan
4. Studi Kelayakan Bisni

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-
Nama PT	Universitas Syiah Kuala, Banda	Universiti Sains Malaysia	
Bidang Ilmu	Akuntansi	Sistem Informasi	
Tahun Masuk-Lulus	1998-2001	2002-2005	
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Pengaruh Sistem Penggajian dan Pengupahan terhadap	Sistem Pangkalan Data Fakultas	
Nama Pembimbing	Drs. Hasan Basri,	Dr. Putra Sumari	

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber*	Jml (Juta)
1	2012	Kesuksesan Wirausahaan Mahasiswa di Propinsi	Hibah Pekerti	70.000.000,-
2.	2008	Pengaruh Self Esteem terhadap Kinerja Dosen Di Fakultas	APBA	7.000.000,-

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber*	Jml (Juta)

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun terbit	Judul artikel	Volume dan tahun	Nama berkala
1	2012	Wirausahawan Mahasiswa di Aceh:Faktor	Vol. 13 Juli. Hal	Jurnal E-

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (*ORAL PRESENTATION*) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah	Penerbit

H. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH, ASOSIASI ATAU INSTITUSI LAINNYA)

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lhokseumawe, September 2015
Pengusul,



(Amru Usman, SE, M.Sc., Ak)

This page is intentionally left blank